

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Akuntansi Pemerintah tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Akuntansi Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah dalam hal ini Lembaga Laporan keuangan kementerian atau kelembagaan adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan dalam hal ini satuan kerja diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada KPPN pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya.” Pengadilan Negeri Jakarta merupakan Institusi di bawah naungan Mahkamah Agung yang dilimpahi APBN, sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Jakarta diwajibkan menerapkan dan menyajikan laporan keuangan yang disusun dan disajikan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang mana penyajian laporan keuangan diharuskan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 . Kementerian Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah beserta perangkatnya wajib menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual selambat lambatnya pada tahun 2014 sedangkan pada Pengadilan Negeri di Jakarta baru dilaksanakan pada tahun 2015. Pengadilan Negeri di Jakarta melaksanakan sistem akuntansi kas menuju akrual yang di karenakan menunggu penyesuaian dari sistem akuntansi berbasis akrual dan penyesuaian tersebut telah dilakukan dari tahun 2011 dan dari sisi aplikasi pihak dari Pengadilan Negeri di Jakarta menunggu aplikasi yang dirancang khusus untuk sistem akuntansi berbasis akrual.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yaitu sistem akuntansi yang diubah dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Aplikasi SAIBA mencakup pencatatan formulir secara, memposting pada buku besar dan membuat laporan keuangan. Perbedaan aplikasi SAIBA dengan aplikasi SAKPA yaitu laporan keuangan yang dihasilkan ke dua aplikasi dan pada menu pesediaan ditambahkan menu transaksi jurnal manual. Aplikasi SAKPA menghasilkan tiga laporan keuangansedangkan pada aplikasi SAIBA menghasilkan lima laporan keuangan, laporan keuangan yang tidak ada pada aplikasi SAKPA yaitu laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional. Aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKPA sama-sama menghasilkan neraca, laporan realisasi anggaran dan CALK, (kemenkeu, 2014).

Menurut (Binsar, 2010) Penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah memiliki beberapa rintangan yaitu:

1. Teknologi Informasi berbasis sistem dan sistem akuntansi
2. Pemimpin yang bertanggung jawab
3. Adanya Sumber Daya Manusia yang profesional
4. Pengaruh pada perpindahan

Dengan keterlambatan merancang aplikasi khusus untuk sistem akuntansi berbasis akrual, tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Apakah setelah enam tahun berjalan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) tersebut sudah cukup memenuhi informasi yang diharapkan Pemerintah terhadap Laporan Keuangan. Dan Apakah setelah enam tahun berjalannya aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yaitu Yoga Wiradz Triputra (2019) Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul

“ Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Penerapan Aplikasi SAIBA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Kantor Pengadilan Negeri Se – DKI Jakarta)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan berdasarkan batasan masalah-masalah diatas penulis merumuskan masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Aplikasi SAIBA terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
3. Bagaimana Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Penerapan Aplikasi SAIBA terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apakah terdapat Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apakah terdapat Pengaruh Penerapan Aplikasi SAIBA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Adakah Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Penerapan Aplikasi SAIBA terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan Kontribusi dalam Pengajaran lebih spesifik terhadap pemahaman Pengaruh SAP berbasis AkruaI dan Penerapan Aplikasi SAIBA terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagi Lembaga Terkait
Menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan dan menjadi

sarana tolak ukur menyangkut Aplikasi Sistem Instansi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) terhadap kualitas laporan keuangan dikantor tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan sumber informasi yang transparan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk menambah pengetahuan jika ingin menjadi dasar membuat peneliti lebih lanjut.